

ABSTRAK

REFORMULASI PERATURAN DIGITAL FORENSIC DI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Sacvio Fath Senajaya (2310622067), Handar Subhandi Bakhtiar, Slamet Tri
Wahyudi

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola dan modus operandi tindak pidana korupsi, yang semakin banyak melibatkan penggunaan sistem elektronik dan data digital. Kondisi ini menjadikan alat bukti digital sebagai elemen penting dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan digital forensik yang jelas, sistematis, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Namun demikian, pengaturan hukum yang berlaku saat ini masih bersifat umum dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga belum memberikan pedoman teknis yang komprehensif mengenai penanganan alat bukti digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi reformulasi peraturan digital forensik dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi serta mengkaji peran pengaturan internal Kejaksaan dalam menjamin kepastian hukum dan kualitas pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan khusus mengenai digital forensik berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik penanganan alat bukti digital, melemahkan nilai pembuktian di persidangan, serta berisiko melanggar prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Peraturan tentang Digital Forensik di lingkungan Kejaksaan RI sebagai bentuk reformulasi kebijakan hukum untuk memperkuat standar pembuktian dan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di era digital.

Kata Kunci: Digital Forensik; Pembuktian; Tindak Pidana Korupsi; Kejaksaan Agung; Reformulasi Hukum.

ABSTRACT

REFORMULATION OF DIGITAL FORENSIC REGULATIONS IN THE EVIDENTIARY PROCESS OF CORRUPTION CRIME CASES AT THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Sacvio Fath Senajaya (2310622067), Handar Subhandi Bakhtiar, Slamet Tri

Wahyudi

The development of information technology has brought significant changes to the patterns and modus operandi of corruption crimes, which increasingly involve the use of electronic systems and digital data. This condition has made digital evidence a crucial element in the evidentiary process of corruption crime cases. Therefore, clear, systematic, and adaptive digital forensic regulations are required, particularly within the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. However, the existing legal framework remains general and fragmented across various laws and regulations, and thus has not provided comprehensive technical guidelines for the handling of digital evidence. This study aims to analyze the urgency of reformulating digital forensic regulations in the evidentiary process of corruption crime cases and to examine the role of internal prosecutorial regulations in ensuring legal certainty and the quality of evidence. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the absence of specific regulations on digital forensics may lead to inconsistent practices in handling digital evidence, weaken its evidentiary value in court, and pose risks to the principle of due process of law. Accordingly, this study recommends the establishment of a Prosecutorial Regulation on Digital Forensics as a form of legal policy reform to strengthen evidentiary standards and enhance the effectiveness of corruption law enforcement in the digital era.

Keywords: *Digital Forensics; Evidence; Corruption Crime; Attorney General's Office; Legal Reform.*